

**EKSISTENSI UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH  
SEBAGAI SIMBOL IDENTITAS BUDAYA DAN HUKUM  
MASYARAKAT MELAYU**

**Henry Kurniati<sup>1</sup>, Oman Fathurahim<sup>2</sup>, Nyimas Umi Kalsum<sup>3</sup>**  
**UIN Raden Fatah Palembang**  
**email: [henykurniatiesa@gmail.com](mailto:henykurniatiesa@gmail.com)<sup>1</sup>, [omanwae@gmail.com](mailto:omanwae@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nyimasumikalsum\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:nyimasumikalsum_uin@radenfatah.ac.id)<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Undang-Undang Tanjung Tanah sebagai simbol identitas budaya dan hukum masyarakat Melayu. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis, sosiologis, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan salah satu naskah hukum tertua di Nusantara yang mencerminkan sistem hukum adat yang telah berkembang secara terstruktur. Selain itu, naskah ini memiliki fungsi simbolik sebagai representasi nilai-nilai budaya masyarakat Melayu, seperti keadilan, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut masih relevan dan dapat diintegrasikan dalam pengembangan hukum nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Tanjung Tanah tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai kultural dan normatif yang penting bagi pembangunan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Identitas Budaya, Melayu, Undang-Undang Tanjung Tanah, Sejarah Hukum.

**Abstract**

*This study aims to analyze the existence of the Undang-Undang Tanjung Tanah as a symbol of cultural identity and law of Malay society. The research method used is normative juridical with historical, sociological, and cultural approaches. The results show that the Undang-Undang Tanjung Tanah is one of the oldest legal manuscripts in the archipelago, reflecting a well-structured customary law system. Furthermore, this manuscript serves as a symbolic representation of Malay cultural values such as justice, honor, and social balance. In the modern context, these values remain relevant and can be integrated into national legal development. Therefore, the Undang-Undang Tanjung Tanah holds not only historical value but also cultural and normative significance for legal development in Indonesia.*

**Keywords:** Customary Law, Cultural Identity, Malay, Tanjung Tanah Law, Legal History.

## PENDAHULUAN

Hukum nasional Indonesia saat ini berada pada persimpangan jalan antara mempertahankan warisan kolonial dan upaya menciptakan hukum yang berbasis pada karakter bangsa. Urgensi kajian hukum adat menjadi sangat krusial di tengah upaya kodifikasi hukum nasional yang seringkali terasa kering dari nilai-nilai lokal. Hukum adat, sebagai *living law* atau hukum yang hidup, menawarkan dimensi keadilan substantif yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh kepastian hukum formal-prosedural. Oleh karena itu, menggali kembali akar hukum adat bukan sekadar upaya romantisme sejarah, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi hukum nasional yang lebih inklusif dan beradab.<sup>1</sup>

Dalam rekonstruksi sejarah hukum di Indonesia, posisi naskah kuno menempati kedudukan yang sangat sentral sebagai sumber data primer. Naskah kuno ini berfungsi sebagai simbol yang menggambarkan tentang budaya dan adat-istiadat masyarakat Nusantara pada masa lampau mengatur dalam mengatur dan menjalankan tata kelola sosial, politik, dan ekonomi mereka. Tanpa referensi tekstual yang kuat, sejarah hukum Melayu akan kehilangan objektivitasnya dan hanya menjadi narasi lisan yang rentan terhadap distorsi. Naskah kuno menyediakan bukti otentik bahwa tradisi literasi hukum dan system kebudayaan telah ada jauh sebelum bangsa Barat memperkenalkan sistem hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu artefak hukum yang paling signifikan dalam khazanah literatur Nusantara adalah Undang-Undang Tanjung Tanah (selanjutnya disebut UUTT). Naskah ini bukan sekadar dokumen biasa, melainkan diakui sebagai salah satu naskah kuno yang merupakan teks hukum Melayu tertua yang pernah ditemukan di Indonesia. Keberadaan UUTT yang berasal dari abad ke-14 memberikan diskursus baru dalam studi hukum kuno, hal ini mengubah paradigma bahwa hukum tertulis di pedalaman Sumatera baru muncul setelah pengaruh Islam masuk secara masif. UUTT menunjukkan adanya sinkretisme nilai yang unik dan kompleks.<sup>3</sup> Bagian yang paling menarik dari naskah kuno UUTT terletak pada usianya yang melampaui naskah-naskah hukum Melayu lainnya seperti Undang-Undang Melaka atau Undang-Undang Laut Melaka. Hal ini menempatkan UUTT sebagai dokumen kunci untuk memahami transisi hukum dari masa Hindu-Buddha menuju masa Islam di Nusantara. Sebagai teks yang tertulis di atas kertas daluang, UUTT menjadi saksi bisu bagaimana otoritas politik pada masa Kerajaan Dharmasraya atau awal Kerajaan Pagaruyung melakukan kontrol sosial melalui instrumen budaya dan hukum tertulis yang sangat detail.

Secara sosiologis, hukum, budaya, dan identitas masyarakat Melayu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam masyarakat Melayu, adat adalah identitas budaya. Kehilangan adat berarti kehilangan budaya kemelayuan itu sendiri. UUTT mencerminkan Gambaran dekriptif tentang adanya norma-norma hukum yang tumbuh dari rahim kebudayaan setempat, yang mengatur segala aspek mulai dari hak kepemilikan tanah hingga sanksi - sanksi pidana lainnya. Hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai pengikat identitas kolektif yang mempersatukan masyarakat dalam satu tatanan nilai yang disepakati Bersama.<sup>4</sup>

Eksistensi UUTT juga mempertegas bahwa masyarakat Melayu memiliki kesadaran hukum yang tinggi sejak masa lampau jauh sebelum datangnya pengaruh budaya asing di Indonesia. Identitas Melayu sering didefinisikan melalui ketaatan terhadap adat dan syarak,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *\*Meninjau Hukum Adat Indonesia\** (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 24.

<sup>2</sup> Teuku Iskandar, *\*Kesusastraan Klasik Melayu Sepanjang Abad\** (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 56.

<sup>3</sup> Uli Kozok, *\*Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Tertua\** (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 2.

<sup>4</sup> Zainal Azam, *\*Hukum Adat dan Identitas Budaya Melayu\** (Pekanbaru: Unri Press, 2015), hlm. 112.

dan UUTT adalah bukti awal dari kodifikasi ketaatan tersebut. Naskah ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya alat kekuasaan politik yang memaksa, melainkan manifestasi dari martabat dan kehormatan sebuah bangsa. Keberadaannya menjadi simbol harga diri intelektual bagi masyarakat Melayu dalam menghadapi klaim superioritas hukum asing.<sup>5</sup> Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang sangat deras, nilai-nilai hukum tradisional yang terkandung dalam UUTT menghadapi tantangan pelestarian yang berat. Paradigma hukum modern yang cenderung positivistik dan sentralistik seringkali menafikan keberadaan hukum adat yang dianggap tertinggal atau tidak relevan. Fenomena ini menciptakan jurang pemisah antara generasi muda Melayu dengan warisan intelektual nenek moyangnya, sehingga nilai-nilai kearifan dalam UUTT semakin terpinggirkan dari praktik kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Tantangan lainnya adalah minimnya aksesibilitas dan literasi naskah kuno di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Banyak naskah kuno yang masih tersimpan sebagai pusaka pribadi atau berada di museum luar negeri, sehingga kajian terhadap isinya tidak bersifat masif. Tanpa adanya upaya digitalisasi dan reinterpretasi kontemporer, naskah seperti UUTT terancam hanya menjadi benda keramat yang dipuja secara simbolis tanpa dipahami substansi hukumnya. Hal ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan identitas hukum Melayu di masa depan.<sup>7</sup> Selain itu, tekanan dari hukum internasional dan perkembangan teknologi informasi menuntut adanya adaptasi hukum yang cepat. Dalam proses adaptasi ini, seringkali hukum lokal dikorbankan demi mengejar standarisasi global. Padahal, banyak prinsip dalam UUTT, seperti penyelesaian sengketa berbasis komunitas dan perlindungan sumber daya alam, sebenarnya sejalan dengan konsep hukum modern seperti *restorative justice* dan pembangunan berkelanjutan. Kegagalan dalam melakukan sinkronisasi ini dapat mengakibatkan hilangnya ruh asli hukum Nusantara.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian naskah akademik ini mendesak untuk dilakukan sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Undang-Undang Tanjung Tanah dalam konteks kekinian. Dengan membedah UUTT secara interdisipliner, kita tidak hanya melestarikan sebuah artefak budaya, tetapi juga memperkaya khazanah hukum nasional dengan nilai-nilai otentik. Pelestarian ini merupakan bentuk perlawanan terhadap amnesia sejarah dan upaya memperkuat identitas bangsa di tengah percaturan hukum global yang semakin kompetitif.<sup>9</sup>

Penelitian terhadap eksistensi UUTT perlu menyoroti aspek budaya dalam perspektif sejarah hukum masyarakat melayu, serta relevansi nilai – nilai hukum dalam UUTT terhadap pembentukan system hukum saat ini. Dalam konteks masyarakat Islam kontemporer, kajian ini menjadi sangat relevan karena banyak konflik modern yang sesungguhnya sudah ada pada naskah kuno UUTT yang merupakan simbol identitas Masyarakat melayu.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi historis Undang-Undang Tanjung Tanah, mengkaji peran simbolik dalam pembentukan identitas budaya Melayu serta mengidentifikasi relevansi nilai hukum dalam konteks kekinian. Penulisan artikel ini dilakukan dengan pendekatan historis yaitu metode analisis kualitatif-deskriptif. Dengan menelaah sumber-sumber primer klasik serta literatur modern, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan obyektif tentang eksistensi UUTT sebagai simbol identitas budaya dan hukum masyarakat melayu.

---

<sup>5</sup> Mahadi, \*Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak Tahun 1960\* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 45.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, \*Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis\* (Bandung: Sinar Baru, 2007), hlm. 102.

<sup>7</sup> Henri Chambert-Loir, \*Sastra dan Sejarah Indonesia\* (Jakarta: KPG, 2011), hlm. 134.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, \*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia\* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 215.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, \*Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional\* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 12.

## **METODE PENELITIAN**

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti terlebih dahulu menelaah berbagai literatur yang relevan dari buku naskah Kitab Undang -Undang Tanjung Tanah yang telah di alih Bahasa dan di transliterasi, serta kajian – kajian dari buku, jurnal dan literatur terkait dengan judul artikel ini. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk memahami arah penelitian terdahulu dan menemukan celah kajian yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif historis (*historical approach*) yang berlandaskan pada disiplin ilmu hukum dan sejarah peradaban Islam. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri fakta, peristiwa, dan tokoh secara kronologis guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai akar konflik serta dampak yuridis, sosiologis dan budaya dalam perkembangan sistem hukum dan budaya melayu di Indonesia.

Adapun jenis data yang digunakan terdiri dari data primer berupa sumber naskah Kitab Undang -Undang Tanjung Tanah dan data sekunder berupa artikel ilmiah, buku-buku kontemporer terkait tema penelitian. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun, membaca, dan menelaah karya ilmiah yang relevan dari perpustakaan dan sumber digital terpercaya.

Langkah-langkah penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pengumpulan data melalui identifikasi sumber primer dan sekunder; (2) verifikasi atau kritik sumber untuk menguji keaslian dan validitas data; (3) interpretasi atau penafsiran terhadap data dalam konteks hukum masa itu; dan (4) penyusunan hasil penelitian dalam bentuk uraian analisis deskriptif yang menjelaskan kronologi, tokoh - tokoh kunci, serta dampak historis yang terjadi dalam perkembangan ilmu hukum dan budaya melayu saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Asal-Usul**

Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan salah satu naskah hukum Melayu kuno yang memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan hukum di Nusantara. Naskah ini ditemukan di daerah Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan diyakini berasal dari periode awal perkembangan peradaban Melayu, sekitar abad ke-14 hingga ke-15 Masehi.<sup>10</sup>

Keberadaan naskah ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu pada masa itu telah mengenal sistem hukum tertulis yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Hal ini menandai adanya perkembangan yang signifikan dari hukum adat yang sebelumnya bersifat lisan menjadi bentuk tertulis. Menurut kajian Uli Kozok, Undang-Undang Tanjung Tanah ditulis menggunakan aksara Incung, yaitu aksara tradisional yang digunakan oleh masyarakat Kerinci.<sup>11</sup> Penggunaan aksara lokal ini menunjukkan kuatnya identitas budaya lokal dalam penyusunan sistem hukum pada masa tersebut.

Selain itu, naskah ini juga memperlihatkan adanya pengaruh budaya luar, khususnya Hindu-Buddha dan Islam, yang mulai masuk dan berinteraksi dengan budaya lokal. Hal ini terlihat dari terminologi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang mencerminkan proses akulturasi budaya dalam masyarakat Melayu.<sup>12</sup>

Naskah Tanjung Tanah berbeda dengan kitab undang-undang lainnya, naskah Tanjung Tanah tidak ditulis dengan menggunakan huruf jawi, melainkan memakai aksara pasca-

---

<sup>10</sup> Uli Kozok, *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Tertua*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 18.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Palawa yang masih serumpun degan aksara Jawa Kuna. Aksaranya masih belum diteliti dengan sempurna, tetapi untuk sementara dapat disimpulkan bahwa aksara yang paling mirip adalah aksara yang diguna kan pada prasasti-prasasti Adityawarman yang bertuliskan aksara Malayu – istilah tersebut merupakan ciptaan De Casparis.

Tabel I Daftar Aksara Terpilih

	<i>incung</i>	<i>rencong</i>	Tj. Tanah
ka			
nga			
ta			
da			
ma			
ca			
ja			
sa			
ra			
wa			

Sumber: Yayasan Naskah Nusantara

Naskah Tanjung Tanah juga berbeda karena tidak ditulis pada kertas melainkan pada kertas daluang sementara naskah melayu yang hingga kini diketahui hampir semuanya menggunakan kertas, baik kertas Arab maupun kertas Eropa. Pada umumnya teks undang-undang menunjukkan pengaruh Islam, dan hampir selalu dibuka dengan formula Bismillahi ar Rahmani ar-Rahim sedangkan naskah Tanjung Tanah dimulai dengan beberapa kalimat berbahasa Sansekerta yang juga mencantumkan tahun penulisan yang sayang sekali tidak terbaca.

Naskah Tanjung Tanah juga ditutup dengan beberapa kalimat berbahasa Sansekerta yang menyebut nama raja, ialah Paduka Ari Maharaja Dharmasraya, dan juga bahwa kitab undang-undang dimaksud untuk seluruh tanah Kerinci (saisi bumi Kurinci). Selain bahasa Sansekerta yang terbatas pada awal dan akhir, naskah Tanjung Tanah seluruhnya ditulis dalam bahasa Melayu. Mengingat teksnya berasal dari abad ke-14 maka bahasa yang digunakan sudah jauh berbeda dengan bahasa Melayu sekarang, dan hanya sebagian yang dapat dimengerti oleh seorang penutur bahasa Melayu zaman kini karena selama masa 600 tahun tentulah bahasa Melayu mengalami perubahan baik dari segi kosa kata maupun dari sintaks kalimat. Bahasa Melayu yang sekarang digunakan di semenanjung Melayu, Sumatra, dan Borneo sangat dipengaruhi oleh bahasa asing, seperti bahasa Asia Selatan (Sansekerta dan Tamil), bahasa Timur Tengah (Arab dan Parsi), dan bahasa Eropa (Portugal, Belanda dan Inggris).

Bahasa-bahasa Timur Tengah dan Eropa sangat mempengaruhi bahasa Melayu, terutama sesudah abad ke-15 sehingga tidak mengherankan bahwa naskah Tanjung Tanah tidak mengandung kata pinjaman dari kedua daerah tersebut. Di zaman sebelum abad ke-15 bahasa Melayu masih kuat dipengaruhi oleh bahasa Sansekerta sehingga teks naskah Tanjung Tanah mengandung kata pinjam Sansekerta yang kini sudah tidak diketahui lagi, dan malahan juga tidak terdapat dalam teks-teks Melayu dari awal periode moderen (kira-kira abad ke 16 dan ke-17), seperti misalnya kata punarapi (lagi pula) yang berulang kali digunakan. Kata-kata kuno lainnya termasuk jika yang dalam bahasa Melayu berubah menjadi jika. Satu-satunya naskah yang saya temukan yang masih menggunakan bentuk kuno jika ialah Hikayat Banjar dan Kota Waringin, yang naskahnya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1663 (Ras, 1968)11. Sifat kekunoan juga tampak pada bentuk mamunuh

(membunuh) yang konsonan awal luluh bila ditambah awalan mem-. Kekunoan bahasa juga nyata pada bilangan 8 yang ditulis dua lapan. Secara etimologis bilangan 8 berasal dari gabungan kata dua dan alapan (yaitu 10 kurang 2).



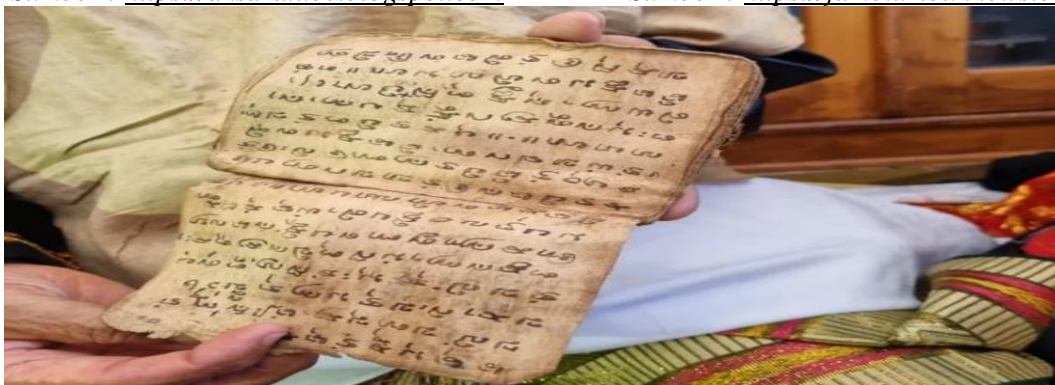
Gambar 1 Lembaran Naskah Kuno Undang – Undang Tanjung Tanah

Sumber : <https://aksaratube.blogspot.com>



Gambar 2 Kondisi Naskah Undang – Undang Tanjung Tanah

Sumber : <https://jambi.tribunnews.com>



Gambar 3 Naskah Kuno Undang – Undang Tanjung Tanah

Sumber : <https://jambi.pikiran-rakyat.com/seni-budaya>

### Struktur dan Isi Naskah

Secara umum, Undang-Undang Tanjung Tanah memiliki struktur yang memuat berbagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun tidak tersusun secara sistematis seperti peraturan perundang-undangan modern, isi naskah ini mencerminkan adanya pembagian norma yang cukup jelas.

Transliterasi naskah Tanjung Tanah tersaji di bawah ini dalam dua versi, yaitu transliterasi kritis dan transliterasi diplomatik. Transliterasi kritis merupakan salinan teliti secara huruf demi huruf, tanda demi tanda, sedapatnya mencerminkan setiap ciri atau kekhususan teks asli. Sedangkan transliterasi diplomatik yang merupakan salinan luwes yang bertujuan memperkirakan bagaimana bacaan teks tersebut sebagaimana yang dimaksudkan.

#### Transliterasi Kritis

1. (Tidak Terbaca)
2. [°Au#] [bé?] ..... [swasi] éri [sá]ka .... [tita] .....ma:sa wèsa:ka //••// .....==°u.. //••// j'ya:s:a: masa titi křn<sub>n</sub>apak<sub>s</sub>a //••// di wasè...ñ<sub>n</sub> p<sub>d</sub>uka s'i ma:ha:raja ka'ta==bèssa śri gan<sub>d</sub>awa<sup>á</sup>śa m<sup>f</sup>adana ; ma:ga...sèña...ka'tabè'sa .....
3. °anug<sup>r</sup>aha: °at<sub>n</sub>a sa<sup>^</sup> [hya] kam<sub>mat</sub>a n<sub>n</sub> p<sub>d</sub>a ma:n<sub>d</sub>alika: di bumi kurin<sub>c</sub>i silu:ñ<sub>n</sub>jur<sub>n</sub> kurinci: maka: ma: == ha: sèñapa:ti p<sup>r</sup>apati sama[h re/ga] t<sub>p</sub><sup>r</sup>abala<sup>^</sup> bala<sup>^</sup> ña<sub>n</sub> disa: p<sup>r</sup>a[ka][ra] dis=i da<sup>ñ</sup>a ==dèsa: ha:lat<sub>n</sub> ma: hal<sub>at</sub> dèsa p<sup>r</sup>adèsa ba: n<sub>w</sub>a saha:ya ; ja:ñan<sub>d</sub>ida °i[da]

4. p<sub>da</sub> dipatiña ya<sup>ˆ</sup> su ra<sup>ˆ</sup> su ra<sup>ˆ</sup>.....bara<sup>ˆ</sup> tida<sup>ˆ</sup> p<sub>da</sub> dipati , d<sub>wa</sub> ta: hil<sup>ˆ</sup> sapaha: dan<sub>da</sub>ña // sada<sup>ˆ</sup> pa<sup>ˆ</sup>huluña baha:wum<sub>man</sub>ˆ t<sup>ˆ</sup>ada ya ma:nurunni , tyada ya ma:nu /ru\ñi pa:ha:wum<sub>man</sub>ˆ , ma:ñada rakah kalahi: , didanda sata:hi:l<sup>ˆ</sup> sa:[pa]
5. ha: // jaka balawan<sub>n</sub>ˆka:d<sub>wa</sub> sama: kanda ka:d<sub>wa</sub> // punara:pi jaka ma ñan<sub>n</sub>ˆakan judi ja:hi: , yang<sup>ˆ</sup> adu ma:....== dan<sub>da</sub> satahil<sub>s</sub>a:paha: ya<sup>ˆ</sup> ba judi kanda satahi:l<sub>s</sub>a:paha: su ra<sup>ˆ</sup> sura<sup>ˆ</sup> , gag<sub>g</sub>a rabut<sub>t</sub>irampas<sub>s</sub>i ma: la:wana<sup>ˆ</sup> ma: ñunus<sub>k</sub>a<sup>ˆ</sup>ris<sup>ˆ</sup> ..... tu m<sub>b</sub>ak<sub>b</sub>unu:h / ma:ti bala[ña] [da:] ka
6. da dusun<sub>n</sub>ˆura<sup>ˆ</sup> dunu=<sup>ˆ</sup>ñan<sup>ˆ</sup> [b]<sup>ˆ</sup>ati mali<sup>ˆ</sup> mañamun<sup>ˆ</sup> d<sup>ˆ</sup>a<sup>ˆ</sup>ka/ika\ñnura<sup>ˆ</sup> mana:giñ marusak<sup>ˆ</sup> rumah..<sup>ˆ</sup> u ra<sup>ˆ</sup> mali<sup>ˆ</sup> rusuh ca<sup>ˆ</sup>ñkal<sup>ˆ</sup> itu pa[ñ] ban<sub>w</sub>aka<sup>ˆ</sup> , sa<sup>ˆ</sup>ñgabumikan<sup>ˆ</sup> buna<sup>ˆ</sup> anak<sup>ˆ</sup>ñna trñata panji<sup>ˆ</sup> ka dalam<sup>ˆ</sup> saparu lawan<sub>a</sub>ipati , ya<sup>ˆ</sup> dunu<sup>ˆ</sup>ñan<sub>n</sub>ˆa didanda d<sub>wa</sub> tahi:l<sub>s</sub>a:paha: // pu
7. narapi jaka<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> ma:magat<sup>ˆ</sup> pa<sup>ˆ</sup>u cap<sup>ˆ</sup> wura<sup>ˆ</sup> dipirak<sup>ˆ</sup>ña<sup>ˆ</sup> ulih<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> ya<sup>ˆ</sup> mamagat<sup>ˆ</sup> , didanda satahi l<sup>ˆ</sup> pa:ha: // • // punarapi bara<sup>ˆ</sup> man<sub>u</sub> bah<sup>ˆ</sup> sukat<sub>an</sub>ˆ gan<sub>a</sub>ˆ cupak<sup>ˆ</sup> , ka: tiyan<sup>ˆ</sup> , kun<sub>d</sub>ˆr bun<sub>k</sub>a/ˆ\piha:yu didanda satahil<sup>ˆ</sup> sa ha: // bara<sup>ˆ</sup> ma:nu<sup>ˆ</sup>gu ura<sup>ˆ</sup> tida ta<sup>ˆ</sup> amit<sup>ˆ</sup>
8. = p<sub>da</sub> pa<sup>ˆ</sup>huluña ura<sup>ˆ</sup> ya<sup>ˆ</sup> di:tu<sup>ˆ</sup>gu ma<sup>ˆ</sup>adaka<sup>ˆ</sup> ran<sup>ˆ</sup>ñna \ baribin<sup>ˆ</sup> didanda satahil<sup>ˆ</sup> sapaha: , ya<sup>ˆ</sup> ma:ñuru pwan<sup>ˆ</sup> samadanda a<sup>ˆ</sup>[.wa]... ra<sup>ˆ</sup> ma:maga<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> tanda<sup>ˆ</sup> barta ma:hu: lukan<sub>j</sub>ˆdi jadi sabu<sup>ˆ</sup> ma:li<sup>ˆ</sup> , ba ra<sup>ˆ</sup> ma:ma:ga<sup>ˆ</sup> didanda satahil<sup>ˆ</sup> sa
9. paha: // • // bara<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> na:yikka: ruma<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> tida ya barsarru barku wat<sup>ˆ</sup> barsulu , bu u sa<sup>ˆ</sup> ga<sup>ˆ</sup>bu mi:ka<sup>ˆ</sup> sala ta<sup>ˆ</sup> uli ma:mu: nu sa<sup>ˆ</sup> gabumikan<sup>ˆ</sup> uli dipa: ti barampat<sup>ˆ</sup> suku , sa:busu: kma mamunu sabusu:ktida
10. ma:muu // • // mali<sup>ˆ</sup> kambi<sup>ˆ</sup> , ma li<sup>ˆ</sup> babi danda sapulu mas<sup>ˆ</sup> // ma: li<sup>ˆ</sup> == anji<sup>ˆ</sup> lima = mas<sup>ˆ</sup> anji<sup>ˆ</sup> ba saja , mali<sup>ˆ</sup> anji<sup>ˆ</sup> ma:wu sapulu mas<sup>ˆ</sup> anji<sup>ˆ</sup> dipati pwan<sup>ˆ</sup> sakyana<sup>ˆ</sup> n<sup>ˆ</sup> // anji<sup>ˆ</sup> ra:ja sata:hil<sup>ˆ</sup> sapa:ha: // ma: = li<sup>ˆ</sup> ha:yam<sup>ˆ</sup> sa:
11. haya<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> , bagi<sup>ˆ</sup> aspula<sup>ˆ</sup> duwa // ha:yam<sup>ˆ</sup> ban<sup>ˆ</sup>nwa sikurpula<sup>ˆ</sup> tiga // ha:yam<sup>ˆ</sup>ku<sup>ˆ</sup>tra bagi sikurpula<sup>ˆ</sup> lima // ha:yam<sup>ˆ</sup>dipati , ayam<sup>ˆ</sup> anak<sup>ˆ</sup> cucu dipa:ti bagi si/ku\ pula<sup>ˆ</sup> tuju // ha:yam<sup>ˆ</sup> ra:ja ba ## gi sa pula<sup>ˆ</sup> dwa kali tuju // ha:y\am<sup>ˆ</sup> ban<sub>w</sub>a lim<sup>ˆ</sup>
12. kupa<sup>ˆ</sup> , hayam pu<sup>ˆ</sup>la /manikal<sup>ˆ</sup> // ha:yam<sup>ˆ</sup>gut<sup>ˆ</sup>ra ta<sup>ˆ</sup> ah tig:a mas<sup>ˆ</sup> // ha:yam<sup>ˆ</sup> anak<sup>ˆ</sup> cucu dipati , ha: yamdipa:ti lima: mas<sup>ˆ</sup> // ha:ya m<sup>ˆ</sup> ra:ja sapulu mas<sup>ˆ</sup> // bara<sup>ˆ</sup> ma iwat<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> , da dandaña satahilsa:paha: , ura<sup>ˆ</sup> pula<sup>ˆ</sup> sarupa:ña //
13. ja:ka<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> tanda<sup>ˆ</sup> baja:la basaja: bawa minam makan<sup>ˆ</sup> la:luka<sup>ˆ</sup> // ba ra<sup>ˆ</sup> syapa<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> mambawa<sup>ˆ</sup> at<sup>ˆ</sup>ña pa: njalak<sup>ˆ</sup> pasugu hi ha:ntar tati du-sun<sup>ˆ</sup> , pakamitkan<sup>ˆ</sup> ulih<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> pu ña dusun<sup>ˆ</sup> // mali<sup>ˆ</sup> tuwak<sup>ˆ</sup> di data sdi bawa , didanda lima: ma:s<sup>ˆ</sup> //
14. ma:li<sup>ˆ</sup> bu:bu , bubu ditimbunni... padi sipanu ña , jaka tida tarisi .... lima: masdandaña // bara<sup>ˆ</sup> ma:...uba...pañcawida , didanda lima ta:hil<sup>ˆ</sup> sapaha: // bara<sup>ˆ</sup> bahila<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> ma:ta karja ya<sup>ˆ</sup> purwa , sa:kati lima danda ña // .. // barbu // bara<sup>ˆ</sup> syapa: ba
15. rbuñi dusa sa<sup>ˆ</sup>kita, danda dwa ta: hil<sup>ˆ</sup> sapaha: // ma:li<sup>ˆ</sup> tapbu dipi kul<sup>ˆ</sup> dijuju<sup>ˆ</sup> diga:las<sup>ˆ</sup> , lima ku pa<sup>ˆ</sup> dandaña // ja:ka: dimakandipaha/lu\ ñña tanamanña tanamkan/.. saba ta<sup>ˆ</sup> di kiri sabata<sup>ˆ</sup> dika[ ]a dikapi t<sup>ˆ</sup> , diga<sup>ˆ</sup> gam<sup>ˆ</sup> sabata<sup>ˆ</sup> di kiri
16. sa:bata<sup>ˆ</sup> di ka: an<sup>ˆ</sup> = dibawa pu- la<sup>ˆ</sup> tida dusa: ña ma:kantabu<sup>ˆ</sup> ita ma:li<sup>ˆ</sup> bira , kaladi , hubi , tuba dipaha:mba dwa pulu dwa la:pa ha:ri, tida handakdipaha:mba , lima: mas<sup>ˆ</sup> danda ña // ma:li<sup>ˆ</sup> bu a siri pina<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> atawa sasa iña , dwa pulu dwa lapa na:
17. ri dapaha:mba , tida ha:ndakdipa:ha: [m]ba lima: masdandaña // ma:li<sup>ˆ</sup> pa:di sata: hil<sup>ˆ</sup> sapa:ha: dandaña // mali<sup>ˆ</sup> hubi bajunju<sup>ˆ</sup> an<sup>ˆ</sup> lima kupa<sup>ˆ</sup> , ya<sup>ˆ</sup> tida bajunju<sup>ˆ</sup> an<sup>ˆ</sup> lima mas<sup>ˆ</sup> dandaña // ma:li[<sup>ˆ</sup>] tallu r<sup>ˆ</sup> ha:yam<sup>ˆ</sup> , itik<sup>ˆ</sup> prapati ditambu ktuju tumbuk<sup>ˆ</sup> lima tumbuk<sup>ˆ</sup> ura<sup>ˆ</sup> ma:
18. na: a<sup>ˆ</sup> i , dwa tumbuktuha:ña..mukaña dihusap<sup>ˆ</sup> da antahi ha:yam<sup>ˆ</sup> .. ti[da] ta risi sakyanta<sup>ˆ</sup> a tiga mas<sup>ˆ</sup> dandaña // ma:li<sup>ˆ</sup> isi jarrat , anji<sup>ˆ</sup> sikurya pisora:wut<sup>ˆ</sup> saha:lay , dandaña // ma:li<sup>ˆ</sup> pulut<sup>ˆ</sup> isi pulut<sup>ˆ</sup> , la<sup>ˆ</sup> a sata:pay yan<sup>ˆ</sup> dandaña , tida tarisi , ta<sup>ˆ</sup> a tiga:

19. mas<sup>⌢</sup> dandaña // ma:li<sup>ˆ</sup> ka:yin<sup>⌢</sup> , ba bat<sup>⌢</sup> ba:ju , distar<sup>⌢</sup> pa:ri rupaña, sapulu ma:sdandaña // mali<sup>ˆ</sup> basi baba:jan<sup>⌢</sup> lima: masdandaña // mali<sup>ˆ</sup> kuraysa:ni lima mas<sup>⌢</sup> // mali la , baja tupa<sup>ˆ</sup> , sapulu masdandaña , ti da tarisi dibunu // <sup>o</sup>ura<sup>ˆ</sup> maru
20. gul<sup>⌢</sup> /si\dandaña // <sup>o</sup>ura<sup>ˆ</sup> mara:ga<sup>ˆ</sup> dwa ta hi:l<sup>⌢</sup> sapaha: , tida tarisi saknya n<sup>⌢</sup> dibunu // ma:li<sup>ˆ</sup> ha:mpa<sup>ˆ</sup> an<sup>⌢</sup> tuwak<sup>⌢</sup> sapa:ra <sup>o</sup>uda<sup>ˆ</sup> sadula<sup>ˆ</sup> ti/ha \ su ku sikur<sup>⌢</sup> babi hu:tan<sup>⌢</sup> sikuñ[ñ]ja , tida tarisi sakyan<sup>⌢</sup> /sa\pulu mas<sup>⌢</sup> dandaña // ma:li<sup>ˆ</sup> ta:ka:lakpa:nyali-...
21. n<sup>⌢</sup> hijuk<sup>⌢</sup> , lima = kupa<sup>ˆ</sup> // pañalin<sup>⌢</sup> ma:no , rutan<sup>⌢</sup> lima: mas<sup>⌢</sup> // paña li <sup>⌢</sup> akarsapulu ma:s<sup>⌢</sup> // mali<sup>ˆ</sup> <sup>o</sup>a ntili<sup>ˆ</sup> an<sup>⌢</sup> lima mas<sup>⌢</sup> // ma:li<sup>ˆ</sup> puka t<sup>⌢</sup> ja:la , ta<sup>ˆ</sup> kul<sup>⌢</sup> , pa:sap<sup>⌢</sup> , talla y<sup>⌢</sup> , gitra<sup>ˆ</sup> , lima masdandaña , ma:mba karda o , babina:sa da u: paka:
22. ra<sup>ˆ</sup> an <sup>o</sup>ura<sup>ˆ</sup> , babina:sa taltalo = y<sup>⌢</sup> , pa a:loy<sup>⌢</sup> ya nura<sup>ˆ</sup> , ha: tapdindi<sup>ˆ</sup> lantay ra: o, lima masdandaña // pu ara:pi jaka bahu:ta<sup>ˆ</sup> mas<sup>⌢</sup> pirak<sup>⌢</sup> riti ra:ncu<sup>ˆ</sup> ka<sup>ˆ</sup> a tambaga , si la:maña batiga puhu:n<sup>⌢</sup> // si ga <sup>⌢</sup> sapa:ha a:yik<sup>⌢</sup> mas<sup>⌢</sup> manikal<sup>⌢</sup> // ja:ka bahu:ta<sup>ˆ</sup> barraspa:di , ja:wa , ja:
23. gu<sup>ˆ</sup> , ha:njalay, dwa tahu: katiga ja mba barruk , labi dwa ta:hunkatiga hi ga <sup>⌢</sup> ña ma:nikal<sup>⌢</sup> // pu:nara:pi ja = ka <sup>o</sup>ura<sup>ˆ</sup> mamba:wa para:hu:ra<sup>ˆ</sup> , ti da disalla<sup>ˆ</sup>ña , hi:la<sup>ˆ</sup> paca binasa , dwa masdandaña // jaka ya disalla<sup>ˆ</sup> [pa]s#a , hila<sup>ˆ</sup> ta = ya pa:ca bina:sa saraga
24. ña bayirbali , jaka tida sili[ ]hi sa:rupa:ña // tida [?/si\?]ya<sup>ˆ</sup>==== liwatdari janja<sup>ˆ</sup> , tuwaksatapay<sup>⌢</sup>pa n<sup>⌢</sup> ha:yamsikur<sup>⌢</sup> kapula<sup>ˆ</sup> an<sup>⌢</sup>ña // bidukpa: ayu gala , ka:ja<sup>ˆ</sup> la: ntay pula<sup>ˆ</sup> an<sup>⌢</sup> , <sup>o</sup>itu pwa <sup>⌢</sup> saknya- <sup>⌢</sup> rak aña // pu arapi /ja\ka <sup>o</sup>ura<sup>ˆ</sup>
25. tudu manudu , tida saksiña, ti da cina tandaña , <sup>o</sup>adu sabu<sup>ˆ</sup> , bara<sup>ˆ</sup> tida ha:ndaksabu<sup>ˆ</sup> diyala kan<sup>⌢</sup> // pu:nara:pi jaka <sup>o</sup>ura<sup>ˆ</sup> ma:bukpa:n<sup>⌢</sup> ni<sup>ˆ</sup> sala la<sup>ˆ</sup>ka sala kata sala ka: ka:kappan<sup>⌢</sup> , ma:mbayirsapat<sup>⌢</sup> sica: ra purwa // pu ara:pi ja:ka <sup>o</sup>ura<sup>ˆ</sup> ba
26. dusa: sa<sup>ˆ</sup>kita hi:ram<sup>⌢</sup> talli nya, ballumta suda pda dati , dapatta <sup>⌢</sup> ta <sup>o</sup>uli jaja:na<sup>ˆ</sup> , kan<sup>⌢</sup>/na\ danda samu= wa dwa == ka:li sapaha , sapa:ha= ka dalam<sup>⌢</sup> , sapa:ha: pda jaja:na<sup>ˆ</sup> = lawa dipa:ti // dipagat<sup>⌢</sup> <sup>o</sup>uli ma nt muda di luwar<sup>⌢</sup> hi ga ta<sup>ˆ</sup> ah tiga:
27. ma:s<sup>⌢</sup> tida jaja: a<sup>ˆ</sup> dipa:ti baruli // jaka barala ha:nlima massa:mas<sup>⌢</sup> pa ruli ha: dipa:ti // hi ga sapulu ma: ska: datas<sup>⌢</sup> batahi:=lla <sup>⌢</sup> , dwa ma spa:ruli handipa:ti // pu ..arapi pda ban<sup>⌢</sup> wa = // pda saha[:]ya , sapulu ta: a ti=ga: mas<sup>⌢</sup> sipattaña , sapu
28. lu maspda: === di[ ]=ti ta<sup>ˆ</sup> a tiga maspda <sup>o</sup>ura<sup>ˆ</sup> puña <sup>o</sup>[a]nak<sup>⌢</sup> // ban<sup>⌢</sup> nwa ja:ka ya bapu u[...n<sup>⌢</sup>ha ak<sup>⌢</sup> ña , dipa:ti dipa: <sup>ˆ</sup> gil<sup>⌢</sup> dahulu bakarja pda di/pati\=== , jaka dipa:ti ku diyan<sup>⌢</sup> <sup>o</sup>uli bakajaka <sup>⌢</sup>hana k<sup>⌢</sup> didusaka <sup>⌢</sup> # sakyanta buñi
29. ña atña tita ma:ha:ra:ja dra mmasara:ya // yatna yatna sida<sup>ˆ</sup> ma: ha:t<sup>⌢</sup> mya sa<sup>o</sup>isi bumi kuri ci , si lunju kuri ci // • samasta li kita<sup>ˆ</sup> == kuja <sup>o</sup>ali dipa:ti , di wasè/ba <sup>⌢</sup> di bumi palimba<sup>ˆ</sup> , di ha: dappanpa:duka sri ma:/ha:\raja dra
30. mmasraya //∞//•// bari sala siliña , suwasta <sup>o</sup>uli sida<sup>ˆ</sup> ma: ha:t<sup>⌢</sup> mya: sa:mapta //∞// // pra=na mya: diwa<sup>ˆ</sup> risa: maléswara<sup>ˆ</sup> // <sup>o</sup>Au.. // pranamy risa diwa=m<sup>⌢</sup> , t lu: kya dipa:ti stutim<sup>⌢</sup> , a: asattru
31. d ta<sup>ˆ</sup> wakitniri satra samuksaya m<sup>⌢</sup>//•//∞// // = pranam<sup>⌢</sup>mya a:ma , tundukra ma:ñamba , sirsa na ka: pa:la , diwa nama di/wa\ta , t na:ma su rga madya prata:la , dipati a:ma la: bi d ri pa:da sa:kal<sup>⌢</sup> = liya <sup>⌢</sup> , na a a:ma: bañak<sup>⌢</sup> , d ta<sup>ˆ</sup> a:
32. ma: ya<sup>ˆ</sup> dika:taka <sup>⌢</sup> , satra a: ma ya<sup>ˆ</sup> satra , sa:muk<sup>⌢</sup>sayamnama sarba sakalliya <sup>⌢</sup> //∞// • // <sup>o</sup>i = ni saluka dipa:ti //

### Transliterasi Diplomatis

1. (Tidak Terbaca)
2. [“aum”] [bé?] [.....] swasti seri saka[warsa]tita [...] masa wèsaka •• [.....] “om” • jyasta masa titi keresnapaksa •• di wasè[ba]n peduka seri maharaja karetabèssa seri gandawa sa maredana, maga-[...] sèna [...] karetabèssa [...]
3. anugeraha atña sa [hya ] kemmattan peda mandalika di bumi kurinci si-lunjur kurinci maka mahasènapati perapatih sama[...].t parebala -bala an di sa pera [ka] [ra] disi de a[n] dèsa hellat mahellat di dèsa peradèsa benuwa sahaya, ja an tida ida

4. peda dipati-ña ya s[a]-ura s[a]-ura [...] bara tida ida peda dipati, dua tahl sa-paha danda-ña • sada pa hulu-ña bahawumman tiyada iya manuranni, tiyada iya manurun[n]i pahawumman, ma ada rakah kalahi, didanda sa-tahl sa-pa-
5. -ha • jaka balawannan kaduwa sama kadanda kadwa • punarapi jaka ma ennakan judi jahi, yang adu ma[...] danda sa-tahl sa-paha, ya bajudi kadanda sa-tahl sa-paha s[a]-ura s[a]-ura , geggah rabutti rampassi malawan ma unus kerris [...] tumbak bunuh; mati bala[ña] da ka
6. da dusun-n-ura dunu an [b]erati mali mañamun diya katkan-n-ura managih marusak rumah ura mali rusuh ce kal itu pabenuwakan, se gabumikan bunah anak-ña tereñaata panji ka dalam saparu lawan dipati, yang dunu an-ña didanda duwa tahl sa-paha • pu-
7. -narapi jaka ura mamagat paucap-w-ura dipirak-ña ulih ura ura ya mamagat, didanda sa-tahl [sa-] paha • punarapi bara ma ubah sukattan ganta cupak, katiyan, kunder[i] bu kal pihayu didanda sa-tahl sa-[pa]ha • bara manu gu ura tida ta amit
8. peda pa huluña ura ya ditu gu ma adakan renñah baribin didanda sa-tahl sa-paha, ya mañuruh puwan sama danda na [..wa] [ba]ra mamaga ura tanda bartah mahulukan judi jadi sabu mali , bara mamaga didanda sa-tahl sa-
9. paha •• bara ura nayik ka rumah ura tida iya barserru barekuwat baresuluh, bunuh se ga bumikan salah ta ulih mamunuh se gabumikan ulih dipati barampat suku, sabusuk mamamunuh sabusuk tida
10. mamunuh •• mali kambu , mali babi danda sa-puluh mas • mali anji lima mas, anji basaja, mali anji mawu sa-puluh mas anji dipati puwan sa-kiyan • anji raja sa-tahl sa-paha • mali hayam sa-
11. haya ura , bagi as pula duwa • hayam bennuwa s[a]-ikur pula tiga • hayam kutera bagi s[a]-ikur pula lima • hayam dipati, ayam anak cucu dipati bagi s[a]-iku[r] pula tujuh • hayam raja bagi sa pula duwa kali tujuh • hayam benuwa lim[a]
12. kupa , hayam pula manikal • hayam gutera te ah tiga mas • hayam-n-anak cucu dipati hayam dipati lima mas • hayam raja sa-puluh mas • bara ma iwat ura , da danda-ña sa-tahl sa-paha, ura pula sa-rupa-ña
13. jaka ura tanda bajalan basaja bawa minam makan lalukan • bara siyapa ura mambawa atña panjalak pasuguhhi hantar tati dusun, pakamitkan ulih ura puña dusun • mali tuwak di datas di bawah, didanda lima mas •
14. mali bubu, bubu ditimbunni [...] padi si-panuh-ña, jaka tida tarisi [...] lima mas danda-ña • bara ma[ ]uba[h] pañcawida, didanda lima tahl sa-paha • bara bahila ura mata kareja ya purewa, sa-kati lima danda-ña •• barebu • bara siyapa ba-
15. -rebuñi dusa sa kita, danda duwa tahl sa-paha • mali tepbu dipikul dijuju digalas, lima kupa danda-ña • jaka dimakan dipahalu-ñ-ña tanaman-ña tanamkan[...] sa-bata di kiri sa-bata di kanan dikapit, dige gam sa-bata di kiri
16. sa-bata di kanan dibawa pula tida dusa-ña makan tebu ita mali birah, kaladi, hubi, tuba dipahamba duwa puluh duwa lapan hari, tida handak dipahamba, lima mas danda-ña • mali bu a sirih pina ura atawa sasa i-ña, duwa puluh duwa lapan-n-[h]a-
17. -ri dapahamba , tida handak dipahamba lima mas danda-ña • mali padi sa-tahl sa-paha danda-ña • mali hubi bajunju an lima kupa , ya tida bajunju an lima mas danda-ña • mali[ ] tellur hayam, itik perapati ditambuk tujuh tumbuk lima tumbuk ura ma-
18. -na ah[h]i, duwa tumbuk tuhan-ña muka-ña dihusap da an tahi hayam tida tarisi sa-kiyan te ah tiga mas danda-ña • mali isi jerrat, anji s[a]-ikur iya piso rawut sa-halay, danda-ña • mali pulut isi pulut, le a sa-tapayyan danda-ña, tida tarisi, te ah tiga
19. mas danda-ña • mali kayin, babat baju distar pari rupa-ña, sa-puluh mas danda-ña • mali basi babajan lima mas danda-ña • mali kuraysani lima mas • mali[ ] [...] baja tupa , sa-puluh mas danda-ña, tida tarisi dibunuh • ura maru-

20. -gul si-danda-ña • ura maraga duwa tahil sa-paha, tida tarisi sa-kiyan dibunuh • mali hampa an tuwak sa-parah uda sa-dula tiha suku s[a]-ikur babi hutan s[likuñ[ñ]a, tida tarisi sa-kiyan sa-puluh mas danda-ña • mali takalak pañali-
21. -n hijuk, lima kupa • pañalin mano, rutan lima mas • pañalin-n-akar sa-puluh mas • mali antili an lima mas • mali pukat jala, te kul, pasap, tellay, gitera , lima mas danda-ña, mambakar da o, babinasa da u paka-
22. -ra an ura , babinasa tal-taloy, panaloyyan-n-ura , hatap dindi lantay ra o, lima mas danda-ña • punarapi jaka bahuta mas pirak riti rancu ka sa tambaga, si-lama-ña batiga puhun • si gan sa-paha nayik mas manikal • jaka bahuta berras padi, jawa, ja-
23. -gu , hanjalay, duwa tahun katiga jamba berruk, labih duwa tahun katiga hi gan-ña manikal • punarapi jaka ura mambawa parahu[-u]ra , tida disella -ña, hila pacah binasa, duwa mas dandanya • jaka iya disella [pasa ?], hila ta iya pacah binasa saraga-
24. -ña bayir bali, jaka tida silihhi sa-rupa-ña • tida [ʔsiʔ]yañ....liwat dari janjañ, tuwak sa-tapay[yaʔ]n hayam s[a]-ikur kapulañ ñan-ña • biduk pañayuh galah, kajañ lantay pulañ ñan, itu puwan sakiyan rakna-ña • punarapi jaka urañ
25. tuduh-manuduh, tida saksi-ña, tida cina tanda-ña, adu sabuñ , barañ tida handak sabuñ diyalahkan • punarapi jaka urañ mabuk penniñ salah lañkah salah kata salah ka kakappan, mambayir sapat si-cara purewa • punarapi jaka urañ ba-
26. -dusa sañkita hiram tellih-ña, bellum ta suda peda d[ip]ati, dapattan ta ulih jajana , kenna danda samu[ ]wan duwa kali sa-paha, sa-paha ka dalam, sa-paha peda jajana lawan dipati • dipagat ulih manter[i] muda di luwar hiñ gan teñ ñah tiga
27. mas tida jajana dipati barulih • jaka barallahhan lima mas sa-mas parulihhan dipati • hiñ gan sa-puluh mas ka datas batahillan, duwa mas parulihhan dipati • punarapi peda bennuwa • peda sahaya, sa-puluh teñ ñah tiga mas si-pattaña, sa-pu-
28. -luh mas peda di[pa]ti teñ ñah tiga mas peda urañ puña anak • bennuwa jaka iya bapuñ u[tka]n hanak-ña, dipati dipeñ ñgil dahulu bakareja peda dipati, jaka dipati kudiyan ulih bakajakan hanak didusakan sa-kiyan ta buñi-
29. -ña atña titah maharaja daremmaseraya • yatna-yatna sidañ mahatmiya sa-isi bumi kurinci, si-lunju kurinci • samasta likitañ kuja ali dipati, di wasèban di bumi palimbañ, di hadappan paduka seri maharaja dare-
30. mmaseraya ~•• bari salah sili[h]-ña, suwasta ulih sida mahatmiya samapta ~ • pranemiya diwañ serisa [a]maléswarañ • “aum” • pranemiya serisa diwam, ter[i]lukyadipati stutim, nana-setteru
31. deretañ wak[eti] nitri satra-samuksayam •• ~ ; pranemmiya nama, tunduk mañambah, sirsa na[ma] kapala, diwa nama diwata, terenama surega madiya paretala, dipati nama labih derri peda sa-kelliyen, nana nama bañak, deretañ na-
32. -ma yañ dikatakan, satra nama yañ satra, samuksayam nama sarba sa-kelliyen ~ • ini saluka dipati ;

#### **Alih Bahasa**

1. [tidak terbaca]
2. Oμ. Pada tahun saka yang baru lalu, pada bulan Vaiçākha .Oμ. Pada bulan Jyaiṣṭhā , di fase bulan mati. Di Waseban paduka Sri Maharaja Yang Menyembuhkan Segala Jenis Racun (?), Yang Lahir Dalam Dinasti Harum, Yang Pertama Antara Para Pegawai Tinggi dan Panglima, Yang Menyembuhkan Segala Jenis Racun (?), yang mulia...
3. Ini anugerah titah Sanghyang Kemitan kepada penguasa di Bumi Kerinci sepanjang Kerinci, beserta hulubalang, para patih, pemuka agama, punggawa, ....., perkampungan pendatang, desa-desa, daerah bawahan, jangan tidak taat.
4. kepada dipatinya masing-masing. Barang siapa tidak taat pada dipati didenda dua seperempat tahil. Bila penghulunya panggil rapat desa dia tidak turun, tidak turun dia ke rapat desa, memancing keributan, didenda satu seperempat tahil.

5. Jika berkelahi sama-sama didenda keduanya. Dan lagi, jika mengenai judi dadu , yang adu .... didenda satu seperempat tahlil, yang berjudi didenda satu seperempat tahlil masing-masing, [bila terjadi] kerusuhan rebut-rampas, melawan, menghunus keris, ..... tombak, bunuh, mati ... ..
6. ... dusun orang bermukim ..... [bila] maling menyamun yang diangkat oleh pihak penagih merusak rumah orang, maka maling yang membuat rusuh itu diasingkan, ... bunuh anaknya, .... lawan dipati tempat pemukimannya didenda dua seperempat tahlil.
7. Dan lagi, jika orang memotong ucapan orang, dan mereka diPIRAK oleh orang-orang yang memotong, dendanya satu [se-]perempat tahlil. Punarapi barang mangubah sukatan gantang cupak, katian, kunderi bungkal pihayu didanda satahil sa[pa]ha. Barang manunggu urang tida ta amit.
8. peda panghulunya urang yang ditunggu mangadakan renyah baribin didanda satahil sapaha, yang manyuruh puan sama danda ... [ba]rang mamagang urang tandang bartah mahulukan judi jadi sabung maling, barang mamagang didanda satahil sa
9. paha. Barang urang naik ka rumah urang tida ia barseru barekuat barsuluh, bunuh senggabumikan salah ta ulih mamunuh senggabumikan ulih dipati barampat suku, sabusuk mamunuh sabusuk tida.
10. mamunuh. Maling kambing, maling babi danda sapuluh mas. Maling anjing lima mas, anjing basaja, maling anjing mau sapuluh mas anjing dipati puan sakian. Anjing raja satahil sapaha. Maling hayam sahaya urang.
11. bagi [esa] pulang dua. Hayam benua s[a]jukur pulang tiga. Hayam kutera bagi s[a]jukur pulang lima. Hayam dipati, ayam anak cucu dipati bagi saiku[r] pulang tujuh. Hayam raja bagi [e]sa pulang dua kali tujuh. Hayam benua lim[a]
12. kupang, hayam pulang manikal. Hayam gutera tengah tiga mas. Hayam anak cucu dipati hayam dipati lima mas. Hayam raja sapuluh mas. Barang mangiwat urang, dandanya satahil sapaha, urang pulang sarupanya.
13. Jaka urang tandang bajalan basaja bawa minum makan lalukan. Barang siapa urang mambawa atnya panjalak pasuguhi hantar tati dusun, pakamitkan ulih urang punya dusun. Maling tuak di datas di bawah, didanda lima mas.
14. Maling bubu, bubu ditimbuni [...] padi sipanuhnya, jaka tida tarisi [...] lima mas dandanya. Barang ma[ng]uba[h] pancawida, didanda lima tahlil sapaha. Barang bahilang urang mata kareja yang purewa, sakati lima dandanya. Barang siapa ba
15. rebunyi dusa sangkita, danda dua tahlil sapaha. Maling tebu dipikul dijujung digalas, lima kupang dandanya. Jaka dimakan dipahalunya tanamannya tanamkan [...] sabatang di kiri sabatang di kanan dikapit, digenggam sabatang di kiri
16. sabatang di kanan dibawa pulang tida dusanya makan tebu itu[.] Maling birah, kaladi, hubi, tuba dipahamba dua puluh dua lapan hari, tida handak dipahamba, lima mas dandanya. Maling bunga sirih pinang urang atawa sasangnya, dua puluh dua lapan [h]a
17. ri diperhambakan, kalau tidak mau diperhambakan, lima mas dendanya. Maling padi satu seperempat tahlil dendanya. Maling ubi yang berikut pohon lima kupang dendanya, yang tidak berikut pohon lima mas dendanya. Mali[ng] telur hayam, itik perapati ditumbuk tujuh tumbuk lima tumbuk urang ma
18. nangahi, dua tumbuk tuhannya mukanya dihusap dangan tahi hayam tida tarisi sakian tengah tiga mas dandanya. Maling isi jerat, anjing s[a]jukur ia piso raut sahalai, dandanya. Maling pulut isi pulut, lenga satapayan dandanya, tida tarisi, tengah tiga
19. mas dandanya. Maling kain, babat baju distar pari rupanya, sapuluh mas dandanya. Maling basi babajan lima mas dandanya. Maling kuraysani lima mas. Mali[ng] [...] baja tupang, sapuluh mas dandanya, tida tarisi dibunuh Urang maru.

20. gul sidandanya. Urang maragang dua tahil sapaha, tida tarisi sakian dibunuh. Maling hampangan tuak saparah udang sadulang tihang suku s[a]jikur babi hutan s[a]jikurnya, tida tarisi sakian sapuluh mas dandanya. Maling takalak panyali.
21. n hijuk, lima kupang, panyalin mano, rutan lima mas, panyalin akar sapuluh mas. Maling antilingan lima mas. Maling pukat jala, tengkul, pasap, telai, giterang, lima mas dandanya[.] Mambakar dango, babinasa dangu paka.
22. rangan urang, babinasa tal-taloy, panaloyan urang, hatap dinding lantai rango, lima mas dandanya. Punarapi jaka bahutang mas pirak riti rancung kangsa tambaga, si-lamanya batiga puhun[,] singgan sapaha naik mas manikal. Jaka bahutang beras padi, jawa, ja.
23. gung, hanjalai, dua tahun katiga jamba beruk, labih dua tahun katiga hinggan nya manikal. Punarapi jaka urang mambawa parahu [u]rang, tida diselangnya, hilang pacah binasa, dua mas dandanya. Jaka ia diselang [pasang?], hilang ta ia pacah binasa saraga
24. nya bayir bali, jaka tida silihi sarupanya. Tida [...] yang [...] liwat dari janjang, tuak satapayan hayam s[a]jikur kapulangannya. Biduk pangayuh galah, kajang lantay pulangan, itu puan sakian raknanya. Punarapi jaka urang.
25. tuduh-manuduh, tida saksinya, tida cina tandanya, adu sabung, barang tida handak sabung dialahkan. Punarapi jaka urang mabuk pening salah langkah salah kata salah kakapan, mambayir sapat sicara purewa. Punarapi jaka urang ba.
26. dusa sangkita hiram telihnya, belum ta suda peda d[ip]ati, dapatan ta ulih jajanang, kena danda samu [...] wan dua kali sapaha, sapaha ka dalam, sapaha peda jajanang lawan dipati. Dipagat ulih manteri muda di luar hinggan tengah tiga.
27. mas tida jajanang dipati barulih. Jaka baralahan lima mas samas parulihan dipati. Hinggan sapuluh mas ka datas batahilan, dua mas parulihan dipati. Punarapi peda benua. Peda sahaya, sapuluh tengah tiga mas sipatannya, sapu.
28. luh mas peda di[pa]ti tengah tiga mas peda urang punya anak. Benua[.] Jaka ia bapungu[tka]n hanaknya, dipati dipanggil dahulu bakareja peda dipati, jaka dipati kudian ulih bakajakan hanak didusakan[.] Sakian ta bunyi (Demikianlah bunyi).
29. nya perintah titah maharaja daremmasera (Dharmasraya). Para pembesar Bumi Kerinci, sepanjang Tanah Kerinci memberi perhatian sepenuhnya. Semua (yang terjadi pada sidang besar) ditulis dengan lengkap oleh Kuja Ali, Dipati, di Waseban, di Palimbang, di hadapan paduka Maharaja dare-.
30. mmasera (Dharmasraya). Bari salah sili[h]nya, suasta ulih sidang mahatmya samapta. Pranemya diwang sirsa [a]maléswarang. Aum. Pranemya serisa diwam, terilukyadipati stutim, nana-seteru.
31. deretang wak[eti] nitri satra-samuksayam. Pranemya nama, tunduk manyambah, siresa na[ma] kapala, diwa nama diwata, teri nama surega madya paretala, dipati nama labih deri peda sakelian, nana nama banyak, deretang na.
32. ma yang dikatakan, satra nama yang satra, samuksayam nama sarba sakelian. Ini saluka dipati.

Adapun substansi yang terkandung dalam naskah ini meliputi:

**Norma Hukum Pidana:**

- Pengaturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran adat
- Hukuman bagi tindak kejahatan seperti pencurian, perkelahian, dan pelanggaran moral
- Penekanan pada keseimbangan dan keadilan dalam pemberian sanksi

**Norma Hukum Sosial:**

- Aturan mengenai hubungan antarindividu dalam masyarakat
- Norma kesopanan dan tata krama
- Pengaturan mengenai kewajiban dan hak anggota masyarakat

**Norma Hukum Adat:**

- Tata cara penyelesaian sengketa
- Peran pemimpin adat dalam menegakkan hukum
- Sistem musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik

**Nilai-Nilai yang Terkandung:**

- Nilai keadilan
- Nilai keseimbangan sosial
- Nilai kehormatan dan martabat
- Nilai kepatuhan terhadap adat

Struktur ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Tanjung Tanah tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat Melayu.

**Kedudukan dalam Tradisi Hukum Melayu**

Dalam tradisi hukum Melayu, Undang-Undang Tanjung Tanah memiliki posisi yang penting sebagai salah satu bentuk awal kodifikasi hukum adat. Naskah ini menjadi bukti bahwa masyarakat Melayu telah memiliki sistem hukum yang terstruktur jauh sebelum masuknya pengaruh hukum kolonial Barat.

Jika dibandingkan dengan naskah hukum Melayu lainnya, seperti Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Tanjung Tanah memiliki karakteristik yang lebih lokal dan sederhana. Namun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam hal pengaturan norma sosial dan hukum yang berlandaskan adat dan nilai keagamaan.

Kedudukan Undang-Undang Tanjung Tanah juga dapat dilihat sebagai bagian dari sistem hukum adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Meskipun saat ini tidak lagi digunakan secara formal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih dapat ditemukan dalam praktik adat masyarakat Melayu, khususnya dalam penyelesaian sengketa dan hubungan sosial.

Selain itu, naskah ini memiliki peran penting sebagai simbol identitas budaya, karena mencerminkan cara pandang masyarakat Melayu terhadap hukum, keadilan, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, Undang-Undang Tanjung Tanah tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai kultural yang relevan hingga saat ini.

**Eksistensi Undang-Undang Tanjung Tanah dalam Sejarah Hukum**

Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan salah satu bukti konkret bahwa masyarakat Melayu telah memiliki sistem hukum yang terstruktur sejak masa lampau. Keberadaan naskah ini menandai peralihan penting dari tradisi hukum lisan menuju hukum tertulis dalam perkembangan hukum adat di Nusantara.

Dalam perspektif sejarah hukum, keberadaan Undang-Undang Tanjung Tanah menunjukkan bahwa norma-norma hukum tidak hanya berkembang secara spontan, tetapi juga mengalami proses kodifikasi yang sistematis. Hal ini sejalan dengan pandangan Cornelis van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki sistematika tersendiri meskipun tidak selalu dikodifikasikan secara formal seperti hukum Barat.<sup>13</sup>

Selain itu, eksistensi naskah ini memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu telah memiliki kesadaran hukum (*legal consciousness*) yang tinggi. Aturan-aturan yang tertuang di dalamnya mencerminkan adanya upaya untuk menciptakan keteraturan sosial melalui norma yang disepakati bersama. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana legitimasi kekuasaan adat.

Dengan demikian, Undang-Undang Tanjung Tanah dapat diposisikan sebagai salah satu fondasi awal dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam

---

<sup>13</sup> Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, (Leiden: Brill, 1928), hlm. 67.

konteks hukum adat Melayu.

### **Undang-Undang Tanjung Tanah sebagai Simbol Identitas Budaya**

Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai simbol budaya yang merepresentasikan nilai-nilai dan identitas suatu masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Tanjung Tanah memiliki fungsi simbolik yang kuat dalam membentuk identitas budaya masyarakat Melayu.

Menurut Clifford Geertz, budaya merupakan sistem makna yang diwujudkan dalam simbol-simbol yang digunakan oleh manusia untuk memahami dan mengatur kehidupannya.<sup>14</sup> Berdasarkan perspektif ini, norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Tanjung Tanah dapat dipandang sebagai simbol yang mencerminkan nilai-nilai dasar masyarakat Melayu.

Beberapa nilai yang direpresentasikan antara lain:

- Keadilan : tercermin dalam sistem sanksi yang berorientasi pada keseimbangan
- Kehormatan : berkaitan dengan martabat individu dan keluarga
- Kolektivitas : menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu
- Keteraturan sosial : diwujudkan melalui kepatuhan terhadap adat

Selain itu, naskah ini juga mencerminkan struktur sosial masyarakat Melayu, termasuk peran pemimpin adat sebagai otoritas dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak terpisah dari sistem kekuasaan dan struktur sosial yang ada.

Dengan demikian, Undang-Undang Tanjung Tanah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang merepresentasikan cara hidup dan nilai-nilai masyarakat Melayu.

### **Relevansi dalam Konteks Hukum Modern**

Meskipun berasal dari masa lampau, nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Tanjung Tanah masih memiliki relevansi dalam konteks hukum modern di Indonesia. Hal ini terutama terlihat dalam prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal, seperti keadilan, keseimbangan, dan musyawarah.

Dalam sistem hukum nasional, pengakuan terhadap hukum adat tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.<sup>15</sup> Dengan demikian, nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Tanjung Tanah dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan hukum nasional yang lebih kontekstual dan berakar pada budaya lokal.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum modern, antara lain:

- Perbedaan karakter antara hukum adat yang fleksibel dan hukum positif yang formal;
- Kurangnya dokumentasi dan kodifikasi hukum adat;
- Pengaruh globalisasi yang menggeser nilai-nilai tradisional.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk melakukan revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai hukum adat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kajian akademik yang mendalam terhadap naskah-naskah hukum tradisional, termasuk Undang-Undang Tanjung Tanah.

Dengan demikian, eksistensi Undang-Undang Tanjung Tanah tidak hanya penting sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat memperkaya sistem hukum nasional Indonesia.

---

<sup>14</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 112.

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Undang-Undang Tanjung Tanah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Tanjung Tanah memiliki eksistensi yang kuat dalam sejarah hukum Melayu sebagai salah satu bentuk awal kodifikasi hukum adat di Nusantara. Naskah ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu telah memiliki sistem hukum yang terstruktur dan kesadaran hukum yang tinggi sejak masa lampau.
2. Undang-Undang Tanjung Tanah tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya masyarakat Melayu. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kehormatan, dan keseimbangan sosial, mencerminkan karakteristik budaya Melayu yang khas.
3. Nilai-nilai hukum dalam Undang-Undang Tanjung Tanah masih relevan dalam konteks hukum modern, terutama dalam hal musyawarah, keadilan restoratif, dan keseimbangan sosial. Nilai-nilai ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan hukum nasional yang lebih kontekstual dan berakar pada budaya lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aman, S. 2014. *Sejarah Kebudayaan Melayu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andaya, L. Y. 2008. *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 215.
- Azam, Zainal. 2015. *Hukum Adat dan Identitas Budaya Melayu*. Pekanbaru: Unri Press, hlm. 112.
- Chambert-Loir, Henri. 2011. *Sastra dan Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG. hlm. 134.
- Drakard, J. 1999. *A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatra*. New York: Oxford University Press.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books. hlm. 112.
- Hooker, M. B. 1986. *Islamic Law in South-East Asia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Iskandar, Teuku. 1996. *Kesusastraan Klasik Melayu Sepanjang Abad*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 56.
- Kozok, U. 2015. *14th Century Malay Code of Laws: The Negarakertagama and the Tanjung Tanah Manuscripts*. Leiden: Brill.
- Kozok, Uli. 2006. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Tertua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 2.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta. hlm. 12.
- Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak Tahun*. Bandung: Alumni. hlm. 45.
- Mulia, R. 1980. *The Ancient Kingdom of Panai and the Ruins of Padang Lawas*. Jakarta: Bulletin of the Research Centre for Archaeology of Indonesia.
- Nurti, S. 2018. *Hukum Adat dan Identitas Budaya: Studi Kasus Masyarakat Melayu Jambi*. Jambi: Persada Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 102.
- Reid, A. 1988. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Volume 1: The Lands below the Winds*. New Haven: Yale University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 24.
- Sweeney, A. 1987. *A Full Hearing: Orality and Literacy in the Malay World*. Berkeley: University of California Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- van Vollenhoven, Cornelis. 1928. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill. hlm. 67.